

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



Tujuan Pembangunan Aceh Singkil ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1	2	3
1	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Kepuasan Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan;	1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan meningkatnya IPM melalui pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
2	2. Mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, kesetaraan, berwawasan Kebangsaan dan Akhlaqul Karimah;	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat .
		3. Memberdayakan masyarakat berbudaya, berkeadilan, kesetaraan, berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah

1	2	3
3	3. Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor <i>economic base</i> yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, pasar tradisional serta industri hasil pengolahan serta bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing;	4. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal berdasarkan <i>economic base</i>
4.	4. Mewujudkan Sistem dan Iklim Daerah yang Kondusif, Demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;	5. Menciptakan iklim daerah yang kondusif . demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal.
5	5. Meningkatkan seluruh sumber daya sektor-sektor unggulan lainnya yaitu industri dan pariwisata;	6. Mengembangkan Sektor Industri dan Pariwisata sebagai nilai tambah masyarakat 7. Mewujudkan Pemenuhan layanan transportasi bagi seluruh masyarakat
6	6. Mewujudkan perluasan lapangan kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan;	8. Mewujudkan Perluasan Lapangan Kerja dan Industri Kreatif

1	2	3
7	7. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera lahir dan batin;	9. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang Sejahtera
8	8. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang Islami.	10. Mewujudkan penerapan Syariat Islam yang Kaffah dalam kehidupan masyarakat Aceh Singkil

Sumber; Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

NO	IKU	RUMUS PERHTUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG -JAWAB
1	2	3	4	5
1	IPM	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ $X_{(1)} : \text{Indeks Harapan Hidup}$ $X_{(2)} : \text{Indeks Pendidikan}$	SPM	BAPPEDA
2	Tingkat daya tampung pendidikan PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa yang tertampung pada PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 4-6 tahun}} \times 100\%$	SPM	DINAS PENDIDIKAN
3	Angka Partisipasi Murni SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	SPM	
4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	SPM	
5	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$	SPM	
6	Rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah lama siswa duduk di bangku sekolah}}{\text{Jumlah lama duduk di bangku SD/SMP/SMA}} \times 100\%$	SPM	

7	Angka melek huruf usia 15-24 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk >15 tahun keatas melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk usia >15 tahun keatas}} \times 100\%$	SPM	
8	Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jml seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$	SPM	DINAS KESEHATAN
9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada*}} \times 100\%$	SPM	

10	Cakupan kelurahan/desa Uci	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) =	$\frac{\text{Jumlah desa /kelurahan UCI}}{\text{Jumlah seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$	SPM	DINAS KESEHATAN
11	Cakupan pelayanan anak balita	Cakupan pelayanan anak balita =	$\frac{\text{Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pd waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama}} \times 100\%$	SPM	DINAS KESEHATAN
12	Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI=	$\frac{\text{Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat Makanan Pendamping - ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin}} \times 100\%$	SPM	DINAS KESEHATAN

13	Cakupan peserta KB aktif	$\frac{\text{Cakupan peserta KB aktif} = \frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	SPM	DINAS KESEHATAN
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP, pneumonia balita, TB paru, DBD dan Diare	$\text{Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk} = \frac{\text{Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan}}{\text{Jumlah Penduduk < 15 tahun}} \times 100\%$	SPM	DINAS KESEHATAN
15	Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	PAD/Penerimaan Daerah*100%	Renstra SKPD	DPKKD
16	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Hasil evaluasi BPK	Renstra SKPD	
17	Cakupan Legislasi Produk Hukum (Raqan, Perbup)	$\frac{\text{Jumlah legislasi yang diterima per tahun}}{\text{Jumlah produk hukum yang disahkan}}$	Renstra SKPD	SETDAKAB
18	Persentase pencapaian sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi	$\frac{\text{Nilai capaian system AKIP tahun lalu}}{\text{Nilai capaian AKIP tahun berjalan}} \times 100\%$	Renstra SKPD	

19	Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD	Tingkat prestasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi inspektorat Aceh/BPKP Aceh	Renstra SKPDL	
20	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	$\frac{\text{KK yg diterbitkan}}{\text{penddk. wajib KK}} \times 100\%$	SPM	DISDUK & CAPIL
21	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	$\frac{\text{KTP elek. yg diterbitkan}}{\text{penddk. wajib KTP elekt.}} \times 100\%$	SPM	DISDUK & CAPIL
22	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	$\frac{\text{kutipan akta kelahiran yg diterbitkan}}{\text{kelahiran yg terjadi}} \times 100\%$	SPM	DISDUK & CAPIL
23	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	$\frac{\text{kutipan akta kematian yg diterbitkan}}{\text{kematian yg terjadi}} \times 100\%$	SPM	
24	Jumlah Prestasi dalam bidang olahraga	Perolehan medali emas, perak dan perunggu dalam setiap event Tk Daerah maupun Tk Nasional	SPM	PORA
25	Tingkat produksi komoditi : Padi, Jagung, Palawija	Jumlah hasil produksi, komoditi Padi, Jagung dan Palawija per tahun	SPM	Pertanian
26	Peningkatan ketersediaan temak per tahun	$\frac{\text{Jumlah temak tahun lalu}}{\text{Jumlah temak tahun ini}} \times 100\%$	Renstra SKPD	Peternakan

		$\frac{\text{Jumlah ternak tahun berjalan}}{\text{Jumlah ternak tahun berjalan}}$		
27	Meningkatnya reboisasi hutan dan penghijauan lahan	$\frac{\text{Jumlah reboisasi hutan dan penghijauan lahan tahun lalu}}{\text{Jumlah reboisasi hutan dan penghijauan lahan tahun berjalan}} \times 100\%$	Renstra SKPD	Kehutanan
28	Tingkat produksi komoditi Sawit	Hasil produksi sawit per ha / tahun	Renstra SKPD	Perkebunan
29	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut	Jumlah hasil penangkapan ikan laut /tahun	Renstra SKPD	Perikanan
30	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar	Jumlah hasil Produksi Perikanan Air Tawar /tahun	Renstra SKPD	
31	Jumlah Koperasi yang aktif	Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Renstra SKPD	Disperindagkop UKM
32	Jumlah Koperasi yang sehat	Jumlah Koperasi yang dilihat dari lembar hasil evaluasi	Renstra SKPD	
33	Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat Dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	$\text{Kecepatan} = \frac{\sum \text{Luas Jalan yang bagus}}{\sum \text{Ruas jalan yang ditempuh keseluruhan}}$		Dinas PU
34	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan	$\text{SPM Air Minum} = \frac{\sum \text{Masyarakat Yang memiliki Akses Air Minum Yang Aman}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Kabupaten Kota Pada Akhir Tahun Pencapaian SPM}}$	SPM	

	bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari			
35	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Rumah layak huni}}{\text{Rumah}} \times 100 \%$	SPM	
36	Persentase pencegahan dini dan Penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana}}{\text{Jumlah bencana per tahun}} \times 100 \%$	Renstra SKPD	BPBD
37	Jumlah objek wisata	Jumlah objek wisata	SPM	Budaya & OR
38	Jumlah wisatawan ke objek wisata : a. Wisatawan dalam Negeri b. Wisatawan luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri per tahun	SPM	
39	Persentase peningkatan penanaman tanaman pada taman jalan utama	Luas Penanaman Taman Jalan utama/Luas areal penanaman Jalan Utama x 100%	SPM	BAPEDALDA

40	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	$\frac{\text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$	SPM	DINSOS, NAKER & TRANS
41	Indeks Keluarga Sejahtera	$\frac{\text{PUS yg usia istrinya < 20 th}}{\text{PUS yg usia istrinya 15 - 49 th}} \times 100$	SPM	BPPKS
42	Jumlah Pelaksanaan Syiar dakwah dan peribadatan kepada masyarakat	Jumlah pelaksanaan Syi'ar Dakwah dan peribadatan selama satu tahun	RENSTRA SKPD	Dinas Syariat Islam
43	Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditindaklanjuti/diselesaikan (Kali)	Jumlah Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	RENSTRA SKPD	

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2015 telah menetapkan dan merevisi perjanjian kinerja sesuai dengan perubahan RPJM Kabupaten Aceh Singkil. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dijabarkan pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia.	1) Indeks Pembangunan Manusia	76%
2. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan.	2) Tingkat daya tampung pendidikan PAUD	44%
	3) Angka Partisipasi Murni SD/MI	108%
	4) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	83,34%
	5) Angka Partisipasi Murni SMA/MA	140,76%
	6) Rata-rata lama sekolah	9,31%
	7) Angka melek huruf usia 15-24 tahun	97,7%
3. Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	8) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	68.91%
	9) Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	95.27 %
	10) Cakupan pelayanan nifas	93.51%
	11) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	68.18%
	12) Cakupan kunjungan bayi	96.82%
	13) Cakupan kelurahan/desa Uci	90.55%
	14) Cakupan pelayanan anak balita	87.27%

	15)	Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan	81.82%
	16)	Cakupan peserta KB aktif	73.82%
	17)	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP, pneumonia balita, TB paru, DBD dan Diare	100%
4. Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	18)	Jumlah masyarakat miskin yang di rujuk ke Rumah Sakit Daerah	1400 Pasien
	19)	Rata-Rata kunjungan Rawat jalan Per hari	75 Pasien
5. Meningkatnya standar Mutu Pelayanan Rujukan, rawat jalan dan dan rawat inap	20)	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kesehatan	31 Unit
6. Meningkatnya sinergitas dan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan daerah	21)	Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	80 %
7. Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	22)	Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	97%
	23)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP (Kategori)
8. Meningkatnya fasilitas penanganan konflik pertanahan daerah	24)	Jumlah Fasilitasi konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	2 HGU
9. Meningkatnya pengembangan pembangunan desa	25)	Jumlah Tapal Batas Desa yang diselesaikan	35 Desa
10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	26)	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	12 SKPD
	27)	Persentase pencapaian sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi	50 %
	28)	Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD	3 (Peringkat)
	29)	Jumlah Laporan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	150 (Rekomendasi)
	30)	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	30 Kasus
11. Meningkatnya Legislasi Peraturan Perundang-undangan	31)	Tingkat Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Qanun 29 Perbup
12. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	32)	Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kepegawaian	1 Unit

13. Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan	33) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	37000 KK
	34) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	91216KK
	35) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	4881 AK
	36) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	4KARTU
14. Meningkatnya pembinaan desa/kampung	37) Jumlah Kampung yang dibina	116 Desa
15. Meningkatnya budaya olahraga dalam masyarakat	38) Jumlah Prestasi dalam bidang olahraga	8 Tropy
16. Terciptanya masyarakat yang berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah.	39) Jumlah Pembinaan partai politik	15 Parpol
17. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:	40) Jumlah Izin yang diterbitkan	1350 Izin
18. Meningkatnya Produktivitas pertanian dan Pembinaan Lembaga petani	41) Tingkat produksi komoditi : a. Padi b. Jagung c. Palawijaya	5600 Ton 225 Ton 1050 Ton
	42) Luas Lahan Tanam	2700 Ha
19. Meningkatkan produktivitas Sektor Peternakan dan kesehatan hewa dalam rangka pencapaian swasembada daging	43) Peningkatan ketersediaan ternak per tahun	2.7 %
20. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	44) Meningkatnya reboisasi hutan dan penghijauan lahan	5 Ha
	45) Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	225 Ha
	46) Luas kerusakan kawasan hutan	78.500 Ha
21. Meningkatnya produksi Perkebunan	47) Tingkat produksi komoditi : a. Sawit b. Karet	156.500 Ton
22. Meningkatnya produksi Perikanan	48) Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut	10.818 Ton

	49) Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar	28,85 Ton
23. Meningkatnya pembinaan Koperasi	50) Jumlah Koperasi yang aktif	92 Unit
	51) Jumlah Koperasi yang sehat	25 Unit
24. Meningkatnya pembinaan UKM	52) Persentase UKMK yang mengembalikan dan bergulir	12 %
25. Terakomodirnya masyarakat pengguna jasa transportasi darat dan laut	53) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten /kota	15 %
	54) Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	15 %
	55) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	15 %
	56) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	20 %
	57) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan	20 %
26. Optimalisasi Mutu Pelayanan Bidang Perhubungan Darat, Sungai dan Laut di Kabupaten	58) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Terminal pad Kabupaten Kota yang telah memiliki terminal	20 %
27. Penguatan Ekonomi Base Daerah bersinergi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat	59) Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	7 Km
	60) Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	35 Km/Jam

	61)	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	1500 Jiwa
	62)	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	4246 M
28. Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Terjangkau	63)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	142 Unit
	64)	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	500 KK
29. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	65)	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20 Desa
30. Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya	66)	Jumlah pelestarian situs resmi daerah	1 Unit
31. Pengurangan resiko bencana	67)	Persentase pencegahan dini dan Penanggulangan bencana	80 %
32. Meningkatnya sumber daya sektor industri dan pariwisata.	68)	Jumlah objek wisata	7 Lokasi
	69)	Jumlah wisatawan ke objek wisata: a. Wisatawan dalam Negeri b. Wisatawan luar Negeri	a. 15.000 b. 3.000
33. Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	70)	Cakupan Kajian Seni (50%)	10 %
	71)	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	5 %
	72)	Cakupan Organisasi Bidang Kesenian	100 %
34. Meningkatkan penataan dan pemeliharaan prasarana dan sarana taman kota dalam rangka mengurangi pemanasan global.	73)	Jumlah pembangunan taman kota	20%
	74)	Persentase peningkatan penanaman tanaman pada taman jalan utama	25 %
35. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan limbah cair, emisi/polusi udara serta limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	75)	Jumlah peralatan laboratorium lingkungan	20%
	76)	Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	1 Industri

	77)	Peningkatan pengelolaan limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	2 Industri
36. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan Danau, Sungai dan Laut terhadap pencemaran oleh limbah domestik.	78)	Jumlah penambahan titik pemantauan Air Danau	12.5 %
	79)	Jumlah penambahan titik pemantauan Air Laut	20 %
37. Meningkatkan kualitas lingkungan terhadap Perubahan iklim dan bencana alam	80)	Cakupan wilayah yang terpantau curah hujan, suhu dan kelembabannya	3 Wilayah
	81)	Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan	1 Laporan
38. Meningkatnya PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	82)	Persentase (%) Fakir Miskin dan PMKS Lainnya Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	3 %
	83)	Persentase (%) Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Memperoleh Pembinaan Sosial Melalui Pendidikan dan Pelatiha	37 % 70 Orang
39. Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Fakir Miskin atau Keluarga Rentan	84)	Persentase (%) Keluarga Miskin Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	50 % 500 Orang
40. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	85)	Persentase (%) Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100 %
41. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Mengevakuasi Korban Bencana Alam	86)	Persentase (%) Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	20 %
42. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	87)	Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Yang Telah Menerima Jaminan Sosia	25 % 200 Orang
	88)	Persentase (%) Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	18 % 185 Orang
43. Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan	89)	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	65 %
44. Meningkatnya Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan,	90)	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	70 %
45. Meningkatnya Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan	91)	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %

Perjanjian Bersama (PB) serta Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	92)	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	50 %
46. Meningkatnya Pemeriksaan Perusahaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan	93)	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%
47. Meningkatnya Perekonomian dan Keterampilan Warga Transmigrasi dan Penduduk Sekitar	94)	Tingkat Perekonomian Warga Transmigrasi	3 UPT
	95)	Tingkat Keterampilan Warga Transmigrasi	3 UPT
48. Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang ber KB dan ber kategori keluarga sejahtera	96)	Indeks Keluarga Sejahtera	20 %
49. Terwujudnya pelayanan KIE KB - KS bagi Masyarakat dan bagi PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	97)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	200 Orang
50. Terwujudnya Pelayanan KIE KB - KS bagi PUS untuk menjadi peserta KB Aktif	98)	Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB – Aktif	9.900 Orang
	99)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	4500 Orang
51. Meningkatkan pembinaan KB - KS bagi peserta KB Aktif Pria dan Wanita melalui PPKB yang tersebar di setiap desa / kelurahan	100)	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB / PKB) 1 petugas di setiap 2 desa / kelurahan	13 Orang
52. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	101)	Jumlah (unit) MUPEN dan MUYAN	2 Unit
	102)	Peningkatan Jumlah KRR	21 Kelompok
53. Meningkatnya fasilitas Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	103)	Persentase peningkatan kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak setelah penyuluhan	25 Kelompok
	104)	Jumlah tenaga pendamping disetiap kelompok Bina Keluarga di kecamatan	13 Plkb
54. Meningkatnya penerapan Syariat Islam yang kaffah dalam kehidupan masyarakat.	105)	Jumlah Pelaksanaan Syiar dakwah dan peribadatan kepada masyarakat	20 Kali

Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	3.977.491.277
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	27.856.993.869
Program Pendidikan Menengah	Rp	9.454.966.235
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	174.390.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Rp	3.430.633.258
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	2.746.507.700
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	2.428.265.374
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp	800.595.900
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	26.533.188
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	1.543.161.904
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp	345.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Rp	110.670.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp	694.439.482
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	22.961.299
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	914.063.722
Program Kemitraan Pegobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan	Rp	12.083.000.000
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Rp	5.298.577.243
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Rp	4.769.590.002
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp	20.000.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp	20.000.000
Program Peningkatan Sistem Kearsipan	Rp	20.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Peustakaan	Rp	56.000.000
Program Supervisi ,Pembinaan Stimulasi Pada Peustakaan	Rp	36.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	137.615.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	1.802.325.000
Program Peningkatan dan Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Rp	100.000.000

Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	140.000.000
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp	95.830.000
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rp	202.270.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp	110.678.000
Program Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD	Rp	76.807.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	137.615.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp	849.400.000
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	455.283.900
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	356.353.500
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	464.175.000
Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp	301.041.207
Program penataan Administrasi Kependudukan	Rp	265.058.581
	Rp	40.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp	255.198.600
Program Pembinaan dan Permasalahatan Olah Raga	Rp	1.041.800.000
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp	2.033.042.800
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	16.550.000
Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	461.523.600
Program peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	1.054.199.982
Program Peningkatan Produksi Pertanian	Rp	1.684.524.884
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Rp	4.987.177.210
Program Penyediaan Sarana Produksi pertanian/perkebunan	Rp	1.500.278.900
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Rp	267.488.434
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp	710.285.127
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	3.717.676.070
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	882.200.000
Program rehabilitasi Hutan & Lahan	Rp	1.798.790.000
Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp	61.200.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	1.359.562.500

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Rp	4.129.905.700
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp	155.600.000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp	806.150.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp	6.611.221.000
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	1.217.667.000
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp	147.600.000
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	74.824.000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang konduktif	Rp	51.300.000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	8.528.545.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp	980.000.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp	9.917.598.578
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp	1.107.551.000
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp	2.884.807.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	54.125.000
Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Rp	10.720.770.137
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	140.956.597.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp	5.093.370.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp	1.492.000.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Rp	6.159.234.850
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp	1.322.075.000
Program Pengembangan Perumahan	Rp	12.538.619.642
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp	1.322.075.000
Program Pengelolaan Keragaman budaya	Rp	620.000.000
Program Tanggap Darurat	Rp	25.000.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp	451.093.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	65.000.000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	210.000.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	902.648.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	153.100.000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp	375.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Rp	698.419.500
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Teencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	93.010.000
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp	230.435.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	219.658.247
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)	Rp	23.948.750
Program Perberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	55.589.000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	55.589.000
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Rp	126.393.500
Program Keluarga Berencana (KB)	Rp	41.500.000
Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp	101.750.000
	Rp	85.000.000
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	28.980.000
Program Bina Hukum Syari'at Islam	Rp	941.390.000
Program Dakwah dan Peribadatan	Rp	4.125.947.025